

No. Daftar FPEB : 267/UN.40.A7.DI/PI/2019

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
CIKONENG KABUPATEN CIAMIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Akuntansi



Disusun oleh:

Widia Damayanti

NIM 1505098

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

2019

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
CIKONENG KABUPATEN CIAMIS**

Oleh
Widia Damayanti

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis

© Widia Damayanti 2019
Universitas Pendidikan Indonesia
Agustus 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, dengan dicetak
ulang, difotocopy, atau cara lainnya tanpa izin dari penulis.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
CIKONENG KABUPATEN CIAMIS**

Disusun oleh:

Widia Damayanti

NIM 1505098

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Nugraha, SE., M.Si. Akt. CA
NIP 196612261990011002



Rd. Dian Hardiana, S.Pd, M.Si
NIP 198605022019031016

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan Akuntansi



Dr. H. Nugraha, SE., M.Si. Akt. CA
NIP 196612261990011002

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
CIKONENG KABUPATEN CIAMIS**

Widia Damayanti

Pembimbing: Dr. H Nugraha, SE, M.Si, Akt, CA.

/Rd. Dian Hardiana, S.Pd, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Cikoneng. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi terhadap perangkat desa berikut masyarakat Desa Cikoneng serta analisis dokumen terkait pengelolaan Dana Desa. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Cikoneng telah akuntabel dengan tidak adanya penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa, adanya partisipasi masyarakat dan transparansi, dan laporan pertanggungjawaban yang sesuai aturan serta dilaporkan tepat waktu. Di bandingkan dengan beberapa desa di Indonesia, kompetensi perangkat desa yang bagus dan adanya pendampingan oleh pendamping desa menjadikan Desa Cikoneng dapat akuntabel dalam pengelolaan Dana Desa. Kemudian, temuan dari penelitian ini adalah terkait kebijakan *cash for work* yang dirasa melunturkan budaya gotong-royong dalam kehidupan masyarakat desa.

Kata kunci : Akuntabilitas, Dana Desa

***ANALYSIS ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN
CIKONENG VILLAGE, CIAMIS REGENCY***

Widia Damayanti

Advisor: Dr. H. Nugraha, SE, M.Si, Akt, CA.

/Rd. Dian Hardiana, S.Pd, M.Si

ABSTRACT

This study aims to describe the accountability of Village Fund Management in Cikoneng Village. The data were collected by using interviews and observations towards village officials, Cikoneng community and some of documents related to Village Fund management. Data obtained from the study were analyzed using qualitative methods with a case study approach. The results showed that the management of Village Funds in Cikoneng Village was accountable in the absence of authority by the head of village, community participation and transparency, and regulatory accountability reports and reported on time. Compared to several villages in Indonesia, the competency of a good village and the assistance of village officials made Cikoneng Village accountable in the management of Village Fund. Then, the findings of this study are related to the cash for work policy which is felt to fade the culture of mutual cooperation in the life of rural communities.

Keywords: accountability, village funds

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMAKASIH.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Teori <i>Stewardship</i>	11
B. Akuntansi Sektor Publik.....	15
C. <i>Good Governance</i>	19
D. Akuntabilitas	22
E. Desa.....	28
F. Dana Desa	35
1. Definisi Dana Desa	35
2. Penyaluran Dana Desa	36
3. Prioritas Penggunaan Dana Desa	37
4. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Desa.....	38
5. Pengawasan Dana Desa.....	39
G. Hasil Penelitian Terdahulu	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Desain Penelitian.....	54
B. Sumber Data.....	54
C. Teknik Pengumpulan Data	55
D. Instrumen Penelitian.....	57

E. Prosedur Penelitian.....	58
F. Teknik Analisis Data.....	60
G. Validitas dan Reliabilitas Penelitian	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Gambaran Objek Penelitian	64
1. Sejarah Desa.....	64
2. Keadaan Geografis	72
3. Keadaan Demografis	74
4. Keadaan Ekonomi	76
5. Kondisi Pemerintah Desa.....	78
B. Karakteristik Informan	81
C. Hasil Penelitian	82
1. Akuntabilitas Kejujuran dan Ketaatan Hukum	82
2. Akuntabilitas Proses.....	87
3. Akuntabilitas Program.....	109
4. Akuntabilitas Kebijakan.....	114
D. Pembahasan Hasil Penelitian	115
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	127
A. Simpulan.....	127
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	137

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Transfer Dana Desa dari APBN	2
Tabel 1.2 Penyerapan Dana Desa Semester II Tahun 2018 di Provinsi Jawa Barat	3
Tabel 1.3 Capaian Output Desa Cikoneng Tahun 2017 dan 2018 (dalam rupiah) ..	6
Table 2.1 Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Swasta.....	18
Tabel 2.2 Ranah Kerja Tiga Kementrian dalam Pemantauan Dana Desa.....	39
Tabel 2.3 Tugas Pihak-Pihak yang Berwenang Melakukan Pengawasan Dana Desa	41
Tabel 2.4 Hasil Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3.1 Instrumen Penelitian	58
Tabel 4.1 Sejarah Pembangunan Desa Cikoneng	65
Tabel 4.2 Penggunaan Lahan di Desa Cikoneng	74
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Cikoneng	75
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Cikoneng.....	75
Tabel 4.5 Lembaga Pendidikan di Desa Cikoneng	76
Tabel 4.6 Angka Pengangguran di Desa Cikoneng	76
Tabel 4.7 Mata Pencarian Penduduk Desa Cikoneng	77
Tabel 4.8 Biodata Perangkat Desa Cikoneng.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Pengelolaan Keuangan Desa	31
Gambar 2.2 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	32
Gambar 2.3 Pengawas Dana Desa	41
Gambar 4.1 Peta Desa Cikoneng	73
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	79
Gambar 4.3 Musyawarah Desa di Desa Cikoneng	84
Gambar 4.4 Pelantikan Kaur Perencanaan oleh Kepala Desa Cikoneng	85
Gambar 4.5 Proses Perencanaan Pengelolaan Dana Desa	92
Gambar 4.6 Buku Standar Harga Satuan Tertinggi Kabupaten Ciamis	97
Gambar 4.7 Perbedaan Struktur Pengelola Keuangan Desa	99
Gambar 4.8 Papan Informasi Program Dana Desa di Desa Cikoneng	102
Gambar 4.9 Posyandu Kenanga di Dusun Ciangini Desa Cikoneng	111
Gambar 4.10Pengurus Desa di Tempat Peternakan Maggot Desa Cikoneng	112

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adam, H. (2015). *Accounting Principle : Melalui Pendekatan Sistem Informasi*. Bandung: Universitas Kebangsaan.
- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa (Study of Implementation of Village Finance to Support Fund Village Policy). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1) hlm. 61-76.
- Alwasilah, C. (2017). *Pokoknya Kualitatif*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Aranha, A.L.M. (2017). Accountability, Corruption and Local Government: Mapping the Control Steps. *The Journal of Brazilian Political Science Assosiation*, 11(2) hlm. 3-31
- Arifiyanto, D. F. dan Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3) hlm. 473-485.
- Azhar, F. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una)*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Aziz, N.L.L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa (The Village Autonomy and The Effectiveness Village Fund). *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2). 193-211.
- Azizal, M., Alam. M.M., and Said, J. (2015). Public Accountability System: Empirical Assessment of Public Sector of Malaysia. *Asian Journal of Scientific Research*, 8(2) hlm. 225-236.
- Balkaoui, A. R. (2004). *Accounting Theory (5th ed.)*. Chicago: Thomson Learning.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2016). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4) hlm. 447-468.
- Carothers, T and Brechenmacher, S. (2014). *Accountability, Transparency, Participation, And Inclusion: A New Development Consensus?*. Washington, DC: Carnegie Endowment.

- Donaldson, L., and Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1) hlm. 49-65.
- Fathurrohman, R. (2016). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Surakarta*. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Gayatri, Latrini, M.Y., dan Widhiyani, N.L.S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2) hlm. 175-182.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harrison, T. M., and Sayogo, D. S. (2014) Transparency, participation, and accountability practices in open government: A comparative study. *Government Information Quarterly*, 1(46) hlm.1-13.
- Haryanto, Arifuddin, dan Sahmuddin. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husaini, U dan Purnomo, S. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrawati. (2007). Peranan Pengeluaran Pemerintah dalam Pertumbuhan Ekonomi di Era Orde Baru dan Era Reformasi. *Jurnal Kajian Ilmiah Penelitian Ubhara Jaya* (8)1.
- Indrianasari. N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2) hlm. 29-46.
- Ismail, M., Widagdo, A.K., dan Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2) hlm. 323-340.
- Iswahyudi, A., Triuwono, I., dan Achsin, M. (2016). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money Dan Good Governance (Studi Empiris Pada Skpd Di Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2) Hlm 151-166.
- Karyanto, R.R. (2016). Apakah Penyaluran Dana Desa Terhambat oleh Karakter Kepala Desa?. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 16(2) hlm. 149 – 161.
- Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta : Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19(1) hlm. 1-34.

- Khoiriah, S., dan Meylina, U. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1) hlm. 20-29.
- Musliha. (2016). *Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset Desa ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Banteang)*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin.
- Makalalag, A.J., Nangoi, G.B., dan Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8(1) hlm. 149-158.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Meutia, I., dan Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2) hlm. 336-352.
- Mir, M., and Bala, S.K. (2014) NGO Accountability in Bangladesh: Two Contrasting Cases. *International Society for Third-Sector Research and The Johns Hopkins University*, 1(1) hlm. 1-21.
- Musliha. (2016) Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Aset Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng). Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin.
- Muslimin, Mappamiring, dan Nurmaeta, St. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *OtoritasJurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1) hlm. 79-85.
- Nafidah, L.N., dan Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2) hlm. 273-288.
- Nafidah, L. N., dan Suryaningtyas, M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(1) hlm. 213-239.
- Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2) hlm. 193-201.
- Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Podrug, N. (2011). The Strategic Role Of Managerial Stewardship Behaviour For Achieving Corporate Citizenship. *Ekonomski Pregled*, 62 (7-8) hlm. 404-420.

- Richard, A., N. (2018) *Transparency and Accountability among Public Sector Entities in Bukvu (East of DRC)*. Dissertation. Kampala: Makerere University.
- Riyani, N. (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016)*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Romantis, P. A. (2015) *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*. Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Salindeho, M.M., Kalangi, L., dan Warongan, J.D.L. (2017). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 8(2) hlm. 128-139.
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U., dan Bougie, J.R. (2016). *Research Methods For Business*. United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd.
- Sinaga, E., J. (2016). Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementrian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. *Jurnal RechtsVinding BPHN*, 5(2) hlm. 261-274.
- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Tesis. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Sulistia, R. (2017). Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2015. *JOM FISIP*, (4)1 hlm. 1-19.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., dan Sofiati, N. A. (2014). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thornton, C. H., & Zuiches, J. J. (2009). After the engagement classification: Using organization theory to maximize institutional understandings. *New Directions for Higher Education*, (147) hlm 75–83.
- Triani, N.N.A., dan Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1) hlm. 136-1.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 19(1) hlm. 136-155.

Wida, S. A., Supatmoko, D., dan Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(2) hlm. 148-152.

Widiyanti, A. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten pasuruan)*. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim.

Yuliansyah & Rusmianto. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salmba Empat.

Publikasi

Badan Pusat Statistika. (2018). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2018*. Jakarta: BPS.

Direktorat Jendral Anggaran. (2017). *Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penganggaran (Isu-Isu Aktual dalam Peran Satker)*. Jakarta: Dirjen Anggaran.

Direktorat Jendral Perbendaharaan Jawa Barat. (2019). *Laporan Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dan Dana Desa Tahun 2018*. Bandung: DJPB Kanwil Jabar.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2018). *Evaluasi dan Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2018*. Jakarta: Kemendes PDTT.

Kementerian Keuangan RI. (2017a). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Kementerian Keuangan RI. (2017b). *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Kementerian Keuangan RI. (2018). *Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota dalam APBN T.A. 2018*. Jakarta: Kemenkeu.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2015). *Akuntabilitas: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. Jakarta: LAN.

Puspawijaya, A. Dan Siregar, J.D.N. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bogor: Pusdiklat BPKP.

World Bank. (1992). *Governance and Development*. Washington, D.C. : A World Bank Publication.

World Bank. (1994). *Governance: The World Bank's Experience*. Washington, D.C. : A World Bank Publication.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Surat Keputusan Kementrian Desa PDTT Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Media Elektronik

Farlex Financial Dictionary. (2012). *Financial Dictionary:Accounting*. [Online]. Tersedia: <https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Accounting>. [14 Februari 2019].

Friana, H. (2018). *Serapan Anggaran Rendah, Apa Dampaknya Bagi Publik?*. [Online]. Tersedia: <https://tirto.id/serapan-anggaran-rendah-apa-dampaknya-bagi-publik-cG7k>. [24 April 2019].

Ma'ruf, S.(2018). *“5 BESAR” Pengertian Akuntansi Menurut Para Ahli*. [Online]. Tersedia: <https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/5-besar-pengertian-akuntansi-menurut-para-ahli/>. [13 Februari 2019].

National Council of Education Research and Training. (2015). *Introduction of Accounting*. [Online]. Tersedia: <http://ncert.nic.in/ncerts/l/keac101.pdf>. [14 Februari 2019].

Purwasetya, B. (2013). *Definisi akuntansi*. [Online]. Tersedia: https://issuu.com/medinaconsulting/docs/definisi_akuntansi. [14 Februari 2019].

- Purwasetya, B. (2015). Definisi Akuntansi. [Online]. Tersedia: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8g4qfyLfgAhUVdCsKHXu4AuAQFjAHegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fkamuskeuangaera.com%2Fimages%2Fartikel%2FDEFINISI%2520AKUNTANSI.pdf&usg=AOvVaw0ojlkfJz3rnWG8cwNPJ5kw>. [13 Februari 2019].
- Rewa, S. (2015). *Akuntabilitas Dalam Perspektif Good Governance*. [Online]. Tersedia: https://www.researchgate.net/publication/281318998_Akuntabilitas_Dalam_Perspektif_Governance [3 Februari 2019].
- Richard, T. (2018). *Penyaluran Dana Desa di Jawa Barat Sudah 100 Persen, DJPb Jabar Tunggu Laporan Pertanggungjawaban*. [Online]. Tersedia: <http://jabar.tribunnews.com/2018/12/19/penyaluran-dana-desa-di-jawa-barat-sudah-100-persen-djpb-jabar-tunggu-laporan-pertanggungjawaban> [19 Januari 2019].
- Situmorang, A.P. (2017). *Ini Alasan Jokowi Terus Tambah Jumlah Dana Desa Tiap Tahun*. [Online]. Tersedia: <https://www.merdeka.com/uang/ini-alasan-pemerintah-jokowi-terus-tambah-jumlah-dana-desa-tiap-tahun.html> [28 Januari 2019].
- Yoyon, H. (2013). *Agency vs Stewardship*. [Online]. Tersedia di: <http://ryobinhood.blogspot.com/2013/02/agency-vs-stewardship.html>. [6 Februari 2019].